

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah serta dapat diketahui apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Disadari sepenuhnya bahwa Laporan ini, masih jauh dari sempurna namun demikian kami selalu berusaha meningkatkan kesempurnaan laporan ini, maka untuk itu diharapkan ada saran dan kritik demi perbaikan laporan pada tahun-tahun yang akan datang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. GAMBARAN UMUM
- B. FUNGSI STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
- C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

### **BAB II PERJANJIAN KINERJA**

- A. PERENCAAN STRATEGIS
- B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016**

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN

### **BAB IV PENUTUP**

- A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA
- B. PERMASALAHAN/KENDALA
- C. STRATEGI NTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1.1 : SDM Menurut Golongan
- Tabel 1.2 : SDM Menurut Golongan
- Tabel 1.3 : SDM Menurut Tingkat Pendidikan
- Tabel 1.4 : SDM Menurut Jenis Kelamin
- Tabel 1.5 : Sarana dan Prasarana
- Tabel 2.1 : Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah  
2013-2018
- Tabel 2.2 : Tujuan/Sasaran Indikator dan Target Kinerja DPMPTSP  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
- Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja
- Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Sasaran
- Tabel 3.3 : Realisasi Anggaran

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2017, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 adalah “Menjadi Lembaga Yang Mampu Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “: Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 3 (Tiga) program dengan 11 (Sebelas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.5.677.109.000,00 (Lima milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2017 untuk mencapai 6 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2017, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 6 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 164,95%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 12 indikator kinerja yang berhasil mencapai nilai kinerja lebih dari 100% sehingga dikategorikan sangat baik, dan 7 (tujuh) indikator yang berhasil mencapai nilai kinerja 100% sehingga dikategorikan baik dan 1 (satu ) indikator yang tidak mencapai 100%.

Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2017 berjumlah Rp 5.677.109.000,00 terealisasi Rp. 5.498.507.935,00 dengan realisasi fisik 100%

dan realisasi keuangan 95,23%. Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atau Pintu Provinsi Jawa Tengah maka meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pelayanan prima serta pemenuhan sarana dan prasarana informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik untuk meningkatkan kualitas aplikasi perizinan online. . Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan peningkatan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Berdasar Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- b. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- e. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, susunan organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas:
  - a. Seksi Perencanaan;
  - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi dan Kewilayahan.
- d) Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri atas:
  - a. Seksi Promosi;
  - b. Seksi Pembinaan;
  - c. Seksi Pemberdayaan Usaha.
- e) Bidang Pelayanan Perizinan terdiri atas:
  - a. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan;
  - b. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian;
  - c. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan ;
- f) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri atas
  - a. Seksi Pengawasan;
  - b. Seksi Pengendalian;
  - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- g) Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan terdiri atas:
  - a. Seksi Penanganan Pengaduan;
  - b. Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Layanan
- h) Bidang Pengelolaan Data dan informasi terdiri atas:
  - a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
  - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.

Adapun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**SDM Menurut Golongan**

NO	UNIT KERJA	PANGKAT / GOLONGAN				TOTAL
		I	II	III	IV	
1.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	2	16	50	18	86

**Tabel 1.2**  
**SDM Menurut Tingkat Pendidikan**

NO	UNIT KERJA	PANGKAT / GOLONGAN							TOTAL
		SD	SLTP	SLTA	SAR- MUD	SAR JANA	S2	S3	
1.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	1	6	19	5	28	26	1	86

**Tabel 1.3**  
**SDM Menurut Jenis Kelamin**

NO	UNIT KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	45	41	86

Sedangkan untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

NO	NAMA BARANG/JENIS BARANG	JUMLAH / VOLUME
1.	Tanah	1 Bidang
2.	Alat-alat besar	4 Unit
3.	Alat-alat angkut	22 Unit
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.993 Unit
5.	Alat Studio dan Komunikasi	93 Unit
6.	Bangunan Gedung	3 Unit
7.	Bangunan Monumen	1 Unit
8.	Bangunan Air Irigasi	1 Unit
9.	Jaringan	1 Unit
10.	Buku dan Perpustakaan	1.642 Buah
<b>TOTAL</b>		<b>3.761</b>

**B. FUNGSI STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH**

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, yaitu :



1. Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah;
2. Peningkatan pelayanan publik dengan mengembangkan sistem yang transparan berbasis teknologi informasi;

### **C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya sinergitas, integrasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
3. Meningkatnya jumlah perizinan yang didelegasikan dari SKPD teknis;
4. Masih terdapat tumpang tindih regulasi penanaman modal antara pusat, provinsi dan kab/kota;
5. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan;
6. Terhambatnya investasi karena tersedianya lahan untuk industri yang terkendala oleh Tata Ruang dan keterbatasan infrastruktur pendukung;
7. Belum optimalnya pencatatan investasi berbasis LKPM;
8. Belum optimalnya pemanfaatan media promosi untuk menarik minat investasi;
9. Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan.

## BAB II

### PERJANJIAN KINERJA

#### A. **Perencanaan Strategis**

Rencana strategis merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum dan di dalamnya mencakup pengembangan misi organisasi, serta tujuan-tujuan pokok yang akan dicapai organisasi secara keseluruhan. Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2013 – 2018.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Oleh karena itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah menjadi satu kesatuan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

##### 1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah 2013 – 2018, ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

##### **Visi Gubernur Jawa Tengah**

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari - *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.*

##### **Misi Gubernur Jawa Tengah**

- (1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
- (2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan, dan pengangguran;
- (3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
- (4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
- (5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;

- (6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- (7) Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

## **2. Tujuan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-2 yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta misi ke-3 yaitu Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”.

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut :

1. Misi ke-2 : “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran”

Tujuan : Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi

Strategi yang dilakukannya itu Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah. Dengan Arah Kebijakan Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsive terhadap perubahan kebijakan nasional dan global.

2. Misi ke-3 : “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”

Tujuan : Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, tersertifikasi, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima. Maka strategi yang dilakukan yaitu:

- a. Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik;
- c. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara PTSP.

Dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan, dan kepastian serta transparansi proses perizinan.
- b. Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota.

### 3. Sasaran

Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 20 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2013-2018 secara lengkap sebagaimana terlampir.

**Tabel 2.1**

**SASARAN JANGKA MENENGAH DPMPSTP PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2013-2018**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja			Target Akhir
			s.d 2016	2017	2018	
1	Peningkatan kepeminatan Penanaman Modal melalui efektifitas Promosi dan Kerjasama yang tepat sasaran.	Meningkatnya jumlah usaha menengah besar yang bermitra dengan usaha menengah kecil	-	70	75	145
		Meningkatnya rasio jumlah izin prinsip terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal.	-	20%	25%	45%
		Meningkatnya rasio perusahaan yang memperluas Penanaman Modal terhadap perusahaan yang dilakukan pembinaan.	-	10%	20%	20%
2.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal	Meningkatnya penyelesaian izin dan non izin sesuai SOP	-	85%	90%	90%
		Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	-	85%	90%	90%
		Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik	-	100%	100%	100%

		Terlayannya permintaan layanan informasi penanaman modal	-	100%	100%	100%
		Terwujudnya system informasi layanan publik tentang penanaman modal dan pemanfaatan media sosial	-	1 paket	1 paket	1 paket
3.	Peningkatan kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal	Bertambahnya izin yang disederhanakan dan penyusunan SOP pelayanan perizinan	-	10 izin	15 izin	15 Izin
		Terbangunnya elektronik service untuk percepatan pengurusan pelayanan perizinan, keterbukaan informasi publik dan untuk mendorong peningkatan realisasi investasi	-	4 paket	6 paket	6 Paket
		Terwujudnya data base penanaman modal	-	1 paket	1 paket	1 Paket
4.	Peningkatan realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	Meningkatnya pertumbuhan proyek PMA dan PMDN	-	10%	12%	12%
		Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN	-	10%	12%	12%
		Meningkatnya proyek penanaman modal sesuai jadwal	-	20%	25%	25%
		Meningkatnya penyelesaian permasalahan penanaman	-	80%	90%	90%

		modal lintas sector				
		Menurunnya pelanggaran ketentuan penanaman modal	-	10%	5%	5%
		Menurunnya proyek penanaman modal yang gagal	-	30%	20%	20%
5.	Peningkatan kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang terintegrasi dan terorganisasi baik lintas sektor dan daerah	Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal Tahunan dan Jangka Mengengah	-	1 dok	2 dok	2 dok
		Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal	-	4 wil	6 wil	6 wil
		Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan		3 sektor	3 sektor	10 sektor
6.	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing Penanaman Modal					

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Kepala Dinas Sosial untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada pencapaian output tetapi termasuk kinerja outcome kesinambungan kinerja pada setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan sinergitas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini yang telah melaksanakan 3 kegiatan 11 kegiatan dengan didukung oleh APBD Rp. 5.677.109.000,00 ( Lima miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah )

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2017 secara lengkap tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**TUJUAN/SASARAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA**  
**DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Meningkatnya kepedulian dan kepedulian Penanaman modal melalui efektifitas Promosi dan Kerjasama yang tepat sasaran	Jumlah Usaha Menengah Besar yang bermitra dengan Usaha Menengah Kecil	70
		Rasio Jumlah Izin Prinsip terhadap Jumlah kepedulian Penanaman Modal (%)	20

2.	Meningkatnya realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	Pertumbuhan proyek PMA dan PMDN (%)	10
		Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN (%)	10
		Penyelesaian perizinan (Izin dan non Izin ) sesuai SOP(%)	85
3.	Meningkatnya kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik (%)	85
		Terselesainya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik (%)	100
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal	Penyederhanaan perizinan dan penyusunan SOP pelayanan Perizinan	10
		Elektronik Service yang terbangun untuk percepatan pengurusan pelayanan perizinan, keterbukaan informasi publik dan mendorong peningkatan realiasi investasi (Paket)	4
		Proyek Penanaman Modal sesuai Jadwal (%)	20
		Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal lintas sektor (%)	80
		Pelanggaran ketentuan Penanaman Modal (%)	10
		Proyek Penanaman Modal yang gagal (%)	30
		Rasio perusahaan yang memperluas penanaman modal terhadap perusahaan yang dilakuakn pembinaan	10



		(%)	
		Terwujudnya database penanaman modal (paket)	1
		Terlayani permintaan layanan informasi publik penanaman modal (%)	100
		Terwujudnya sistem informasi layanan publik tentang penanaman modal dan pemanfaatan media sosial (web/Twitter/SMS/dll) paket	1
5.	Meningkatnya kualitas perencanaan PM yang terintegasi dan terorganisasi baik lintas sektor	Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal Tahunan dan Jangka Mengengah (Dokumen)	1
		Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan Penanaman Modal (satuan kawasan/wilayah kab/kota)	4
6.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya sarana dan prasarana apartur untuk mendukung peningkatan daya saing PM	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (sektor/bidang/usaha/tahun)	3

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (Performance improvement).

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>No.</b>	<b>Skala Pencapaian Kinerja</b>	<b>Kategori</b>
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100 %	Baik
3	50 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi 6 sasaran strategis, yaitu : (1) Peningkatan kepeminatan Penanaman Modal melalui efektifitas Promosi dan Kerjasama yang tepat sasaran, (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal, (3) Peningkatan kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal, (4) Peningkatan realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan, (5) Peningkatan kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang terintegrasi dan terorganisasi baik lintas sektor dan daerah, (6) Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing Penanaman Modal

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran**

NO	Indikator Kerja	Sat	Real Th. 2016	Tahun 2017			Target Akhir Renstra	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
				Target	Real	% Capaian		
1.	Jumlah Usaha Menengah Besar yang Bermitra dengan Usaha Menengah Kecil		-	70	174	248,57	145	120
2.	Rasio Jumlah Ijin Prinsip dan terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal (%)		-	20	34,29	171,45	45	76,2
3.	Pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN (%)		-	10	14,02	140,20	12	116,83
4.	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN		-	10	34,98	349,80	12	291,5
5.	Penyelesaian Izin dan Non Perizinan sesuai SOP (%)		-	85	99,95	117,59	90	1,110
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik (%)		-	85	87,64	103,11	90	97,37
7.	Terselesaikannya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik (%)		-	100	89,55	89,55	100	89,55
8.	Penyederhanaan Perijinan dan Penyusunan SOP Pelayanan Perijinan (Unit Jenis/Non Ijin)		-	10	14	140	15	93,33
9.	Elektronik service yang terbangun untuk percepatan pengurusan pelayanan perijinan, keterbukaan informasi publik dan mendorong peningkatan realisasi investasi (paket)		-	4	4	100	6	66,67
10.	% Proyek penanaman modal sesuai jadwal		-	20	27,86	139,30	25	111,44
11.	%Penyelesaian permasalahan penanaman modal lintas sektor		-	80	88,24	110,30	90	98,04
12.	% pelanggaran ketentuan penanaman modal		-	10	1,57	637	5	18,47
13.	Proyek penanaman yang gagal		-	30	1,14	2632	20	754,38

14.	Rasio perusahaan yang memperluas penanaman modal terhadap perusahaan yang dilakukan pembinaan	-	10	10,71	107,1	20	53,55
15.	Database penanaman modal yang terbangun (paket)	-	1	1	100	1	100
16.	Terlayani permintaan layanan informasi publik penanaman modal (%)	100	100	100	100	100	100
17.	Terwujudnya sistem informasi layanan publik tentang penanaman modal dan pemanfaatan media sosial (web/twitter/sms/dll)(paket)	1	1	1	100	1	100
18.	Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/ Bidang Usaha Unggulan (sektor/ bidang/ usaha/ tahun)	2	3	3	100	10	30
19.	Tersedianya rencana umum penanaman modal tahunan dan jangka menengah (dokumen)	-	1	1	100	2	50
20.	Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal (satuan kawasan/wilayah kab/kota)	-	4	4	100	6	66,67
<b>TOTAL</b>						<b>274.3</b>	<b>116,75</b>

Dalam melaksanakan urusan penanaman modal dilakukan melalui 3 program, yaitu: Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi; serta Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Indikator kinerja program yang mendukung urusan Penanaman Modal sebanyak 20 indikator, dengan rincian sampai dengan Desember 2017 sebanyak 19 indikator (95%) tercapai dan 1 indikator (5%) masih dalam proses.

Dengan 2 indikator kinerja program yaitu Jumlah Usaha Menengah Besar yang Bermitra dengan Usaha Menengah Kecil sebanyak 174 kemitraan, melebihi target yaitu 70 kemitraan, dengan tingkat capaian 248,57%, tingginya capaian merupakan upaya untuk meningkatkan peran Usaha Menengah Kecil di Jawa Tengah sebagai bagian dari *stakeholder* Usaha Menengah Besar; dan Rasio Jumlah Izin Prinsip terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal sebesar 34,29%, melebihi target 20%, dengan tingkat capaian 171,45%, tingginya capaian merupakan hasil keseriusan para investor yang menandatangani *Letter of Intent (LoI)* atau kepeminatan untuk berinvestasi di Jawa Tengah dan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota

di Jawa Tengah yang mendorong dan memberikan jaminan investasi bagi para calon investor tersebut. Dampak positif dari pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yaitu dikenalnya potensi dan peluang investasi di Jawa Tengah, baik di luar daerah Provinsi Jawa Tengah maupun di luar negeri.

Dengan adanya 15 indikator kinerja program antara lain Pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN sebesar 14,02% melebihi target 10%; Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN sebesar 34,99% melebihi target 10%; Penyelesaian Perizinan (Izin dan Non Izin) sesuai SOP sebesar 99,95% melebihi target 85%; Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sebesar 87,64% melebihi target 85%; terselesaikannya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik sebesar 89,55% kurang dari target 100%; Penyederhanaan Perizinan dan Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan sebanyak 14 unit jenis izin/non izin melebihi target sebanyak 10 unit jenis izin/non izin; Elektronik service yang terbangun untuk percepatan pengurusan pelayanan perijinan, keterbukaan informasi publik dan mendorong peningkatan realisasi investasi sebanyak 4 paket sesuai target yaitu aplikasi pelayanan perizinan, *Geographic Information System (GIS)*, aplikasi Smart Phone (Android), dan Web Service; Proyek penanaman modal sesuai jadwal sebesar 27,86% melebihi target 20%; Penyelesaian permasalahan penanaman modal lintas sektor sebesar 88,24% melebihi target 80%; Pelanggaran ketentuan penanaman modal sebesar 1,57% dibawah target 10%, hal ini sangat baik karena hanya sebagian kecil para investor yang tidak mematuhi ketentuan peraturan penanaman modal; Proyek penanaman modal yang gagal sebesar 1,14% dibawah target 30%, hal ini sangat baik dikarenakan lebih banyak proyek yang bisa merealisasikan proses produksinya (terbit Izin Usaha) sehingga dapat membuka lapangan kerja baru; Rasio perusahaan yang memperluas penanaman modal terhadap perusahaan yang dilakukan pembinaan sebesar 10,71% melebihi target 10%. Dampak dari pelaksanaan program ini yaitu meningkatnya realisasi investasi dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah.

Dengan indikator kinerja program Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan sebanyak 3 sektor/bidang/usaha/tahun sesuai target dan melebihi tahun sebelumnya yaitu 2 sektor/bidang/usaha/tahun, yaitu bidang infrastruktur, pangan dan energi; Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal tahunan dan jangka menengah 1 dokumen sesuai target; dan Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal sebanyak 4 kawasan/wilayah kab/kota sesuai target yaitu Kawasan industri di wilayah Petanglong dan Bergasmalang, pengembangan pariwisata terpadu wilayah Barlingmascakeb, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal di wilayah Kedungsepur, dan pengembangan penghasil produk pertanian untuk ketahanan pangan di Jawa Tengah (lokasi se Jawa Tengah). Dampak dari dilaksanakannya

program ini yaitu tersedianya bahan kajian potensi dan peluang investasi, serta kajian wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal yang strategis bagi calon investor yang akan berinvestasi di Jawa Tengah.

Program pendukung sasaran strategis antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;
5. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi;
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya sinergitas, integrasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
3. Meningkatnya jumlah perizinan yang didelegasikan dari SKPD teknis;
4. Masih terdapat tumpang tindih regulasi penanaman modal antara pusat, provinsi dan kab/kota;
5. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan;
6. Terhambatnya investasi karena tersedianya lahan untuk industri yang terkendala oleh Tata Ruang dan keterbatasan infrastruktur pendukung;
7. Belum optimalnya pencatatan investasi berbasis LKPM;
8. Belum optimalnya pemanfaatan media promosi untuk menarik minat investasi;
9. Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/ sektor/ bidang usaha unggulan.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

1. Optimalisasi kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Optimalisasi sinergitas, integrasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penerbitan Angka Pengenal Importir (API), TKA, Izin alat tangkap ikan ramah lingkungan, dan Penyelenggaraan Forum PTSP;
3. Penanganan pendelegasian perizinan dari SKPD teknis melalui Rakor Penyusunan SOP, desk persyaratan perizinan, dan Rakor Penyederhanaan Perizinan.
4. Melaksanakan Rakor Harmonisasi Regulasi Penanaman Modal yang tumpang tindih antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
5. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui pembangunan E-

Service.

6. Penanganan kendala tata ruang dan infrastruktur melalui Pelaksanaan Tim Pengendalian Penanaman Modal (Task Force);
7. Optimalisasi pencatatan realisasi investasi melalui Sosialisasi pengisian LKPM, pendampingan pengisian LKPM ke perusahaan dan aparaturnya PM Kab/Kota ;
8. Pemanfaatan media promosi untuk menarik minat investasi melalui Pameran Investasi , Central Java Investment Business Forum (CJIBF), dan Business Meeting ;
9. Penyediaan informasi mengenai peluang usaha/ sektor/ bidang usaha unggulan melalui Penyusunan Kajian Profil Potensi dan Peluang Investasi, penyelenggaraan Forum Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal, RKPPMD, serta Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Tahunan dan Jangka Menengah.

## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, didukung dengan anggaran Rp. 24.065.768.000,00 ( Dua puluh empat milyar enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 13.289.559.000,00
2. Belanja Langsung : Rp. 10.776.209.000,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam rangka mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.852.000.000	2.619.321.014	91,84
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.217.100.000	2.115.989.251	95,44
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	27.888.000	92,96
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	421.846.000	419.857.795	99,53

	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	3.488.282.000	3.378.793.990	96,86
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.766.981.000	1.699.856.150	96,2
		10.776.209.000	10.261.706.200	95,23

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2017 terjadi efisiensi sebesar Rp. 514.502.800,00 atau 4,77%



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dengan memperhatikan capaian indikator sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan bahwa semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan katagori **sangat baik**. Hal ini didukung oleh data dari toa pencapaian target sasaran yaitu sebesar 247,298%

#### **B. PERMASALAHAN / KENDALA**

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 antara lain :

10. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
11. Belum optimalnya sinergitas, integrasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
12. Meningkatnya jumlah perizinan yang didelegasikan dari SKPD teknis;
13. Masih terdapat tumpang tindih regulasi penanaman modal antara pusat, provinsi dan kab/kota;
14. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan;
15. Terhambatnya investasi karena tersedianya lahan untuk industri yang terkendala oleh Tata Ruang dan keterbatasan infrastruktur pendukung;
16. Belum optimalnya pencatatan investasi berbasis LKPM;
17. Belum optimalnya pemanfaatan media promosi untuk menarik minat investasi;
18. Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan.

#### **C. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain :

1. Optimalisasi kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui Kegiatan

- Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Optimalisasi sinergitas, integrasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penerbitan Angka Pengenal Importir (API), TKA, Izin alat tangkap ikan ramah lingkungan, dan Penyelenggaraan Forum PTSP;
  3. Penanganan pendelegasian perizinan dari SKPD teknis melalui Rakor Penyusunan SOP, desk persyaratan perizinan, dan Rakor Penyederhanaan Perizinan.
  4. Melaksanakan Rakor Harmonisasi Regulasi Penanaman Modal yang tumpang tindih antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
  5. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui pembangunan E-Service.
  6. Penanganan kendala tata ruang dan infrastruktur melalui Pelaksanaan Tim Pengendalian Penanaman Modal (Task Force);
  7. Optimalisasi pencatatan realisasi investasi melalui Sosialisasi pengisian LKPM, pendampingan pengisian LKPM ke perusahaan dan aparaturnya PM Kab/Kota ;
  8. Pemanfaatan media promosi untuk menarik minat investasi melalui Pameran Investasi , Central Java Investment Business Forum (CJIBF), dan Business Meeting ;
  9. Penyediaan informasi mengenai peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan melalui Penyusunan Kajian Profil Potensi dan Peluang Investasi, penyelenggaraan Forum Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal, RKPPMD, serta Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Tahunan dan Jangka Menengah.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2017 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan atau kinerja yang akan datang.